

## **IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR RAKYAT**

Dengan Persyaratan Sebagai Berikut :

1. Surat Permohonan (Materai 6000)
2. Surat Pernyataan bermeterai Rp. 6.000, ditandatangani Pemilik atau Pengurus atau Penanggung Jawab Perusahaan dan untuk badan usaha juga diberi stempel
3. Pasfoto berwarna terbaru 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar
4. KTP Penanggung Jawab Perusahaan
5. Surat Kuasa bermeterai Rp. 6.000 dan KTP Elektronik (KTP El) Penerima Kuasa (apabila dikuasakan)
6. Akta pendirian perusahaan dan semua perubahannya (jika ada) untuk badan usaha (khusus untuk Perseroan Komanditer (CV) dan Perseroan Firma (Fa) harus lengkap dengan pengesahan Panitera Pengadilan Negeri sebagai tanda bahwa akta tersebut telah didaftarkan dan dicatat pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri)
7. Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan HAM (jika ada) untuk PT.
8. NPWP
9. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
10. Izin Prinsip dari Bupati
11. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang
12. Izin Lokasi
13. Bukti status kepemilikan / penguasaan tanah dan / atau bangunan kantor / tempat usaha / kegiatan oleh Pemohon perorangan atau Perusahaan Perdagangan berupa: 1) sertifikat, 2) salinan buku letter C / kerawangan desa / kelurahan yang telah disahkan Kepala Desa / Lurah; 3) kohir / petok yang telah disahkan Kepala Desa / Lurah; 4) akta dilengkapi bukti alas haknya; dan / atau 5) surat keterangan ahli waris yang telah disahkan Kepala Desa / Lurah dan Camat dilengkapi bukti alas haknya
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS PBB) / bukti pelunasan PBB tahun berkenaan atas tanah dan / atau bangunan kantor perusahaan

Nomor :  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Permohonan Izin  
Pengelolaan Pasar Rakyat

Arga Makmur, 2020

Kepada Yth,  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
Kab. Bengkulu Utara  
di -  
ARGA MAKMUR

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan pasar rakyat, dengan data sebagai berikut :

1. Identitas Pemohon

- a. Nama Pemohon :
- b. Direktur/Penanggung Jawab :
- c. Alamat :

2. Identitas Perusahaan

- a. Nama :
- b. Jabatan dalam Perusahaan :
- c. Alamat :
- d. Kode pos :
- e. No. Hp :
- f. No. KTP :
- g. Kewarganegaraan :

Demikian Surat permohonan ini, atas pertimbangannya kami ucapkan terimakasih

Pemohon

Materai 6000

-----



# PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

## DINAS PENANAMAN MODAL

Jln. Prof. M. Yamin, SH Arga Makmur, Bengkulu Utara Telp. (0737)5241370 Kode Pos 38611

Website : [www.dpm.bengkuluutarakab.go.id](http://www.dpm.bengkuluutarakab.go.id)

E-mail : [dpm.bengkuluutara@gmail.com](mailto:dpm.bengkuluutara@gmail.com)

### CHEKLIS : ~ Surat Izin Pengelolaan Pasar Rakyat ~

No	Kelengkapan Administrasi	Ada	Tidak ada	Ket.
1.	Surat Permohonan (Materai 6000)			
2.	Surat Pernyataan bermeterai Rp. 6.000, ditandatangani Pemilik atau Pengurus atau Penanggung Jawab Perusahaan dan untuk badan usaha juga diberi stempel			
3.	Pasfoto berwarna terbaru 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar			
4.	KTP Penanggung Jawab Perusahaan			
5.	Surat Kuasa bermeterai Rp. 6.000 dan KTP Elektronik (KTP El) Penerima Kuasa (apabila dikuasakan			
6.	Akta pendirian perusahaan dan semua perubahannya (jika ada) untuk badan usaha (khusus untuk Perseroan Komanditer (CV) dan Perseroan Firma (Fa) harus lengkap dengan pengesahan Panitera Pengadilan Negeri sebagai tanda bahwa akta tersebut telah didaftarkan dan dicatat pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri)			
7.	Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan HAM (jika ada) untuk PT.			
8.	NPWP			
9.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan			
10.	Izin Prinsip dari Bupati			
11.	Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang			
12.	Izin Lokasi			
13.	Bukti status kepemilikan / penguasaan tanah dan / atau bangunan kantor / tempat usaha / kegiatan oleh Pemohon perorangan atau Perusahaan Perdagangan berupa: 1) sertifikat, 2) salinan buku letter C / kerawangan desa / kelurahan yang telah disahkan Kepala Desa / Lurah; 3) kohir / petok yang telah disahkan Kepala Desa / Lurah; 4) akta dilengkapi bukti alas haknya; dan / atau 5) surat keterangan ahli waris yang telah disahkan Kepala Desa / Lurah dan Camat dilengkapi bukti alas haknya			
14.	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS PBB) / bukti pelunasan PBB tahun berkenaan atas tanah dan / atau bangunan kantor perusahaan			

*Catatan : Semua berkas dibuat rangkap 2 di map terpisah*

Mengetahui, Kasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		Diperiksa Oleh
--	--	----------------